



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIGIT HERU MURTI BS
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 738151

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.668.200.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m ² /184 m ² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 885.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m ² /80 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.385.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m ² /36 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000		
4. Tanah Seluas 356 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 783.200.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	560.000.000
1. MOBIL, HONDA CR-V RM3 2WD 2.4 AT CKD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000		
2. MOTOR, HONDA X1N02044L0 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
4. MOTOR, HONDA NC11A2CB AT/VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
5. MOBIL, KIA SONET Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HADIAH Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	357.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	831.170.323
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.416.870.323
III. HUTANG	Rp.	154.515.837
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.262.354.486

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.